

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN BERBEK  
DESA BALONGREJO

---

PERATURAN DESA BALONGREJO  
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BALONGREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Balongrejo Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
  13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 7);
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023;
32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
33. Peraturan Desa Balongrejo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Balongrejo Tahun 2023 Nomor 03)

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALONGREJO  
dan  
KEPALA DESA BALONGREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Pendapatan Desa	Rp. 1.976.489.480,00
1. Belanja Desa	<u>Rp. 2.050.253.410,00</u>
(Defisit)	Rp. (73.763.930,00)
2. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 78.461.905,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 5.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 73.763.930,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa.

## Pasal 5

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
  - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
  - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,
- Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

## Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Balongrejo.

Ditetapkan di Balongrejo  
pada tanggal 30 Desember 2022



Diundangkan di Balongrejo  
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DESA BALONGREJO,

M. NURCHOLIS P.

LEMBARAN DESA BALONGREJO TAHUN 2023 NOMOR 5

LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA BALONGREJO  
 NOMOR 5 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA BALONGREJO  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	275.300.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.701.189.480,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.976.489.480,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	526.790.240,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	643.698.620,00	
5.3.	Belanja Modal	778.564.550,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	103.200.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.050.253.410,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(73.763.930,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pemblayaan	78.763.930,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	78.763.930,00	
6.2.	Pengeluaran Pemblayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>73.763.930,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Balongrejo, 23 Desember 2022



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA BALONGREJO  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	275.300.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.431.189.480,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.706.489.480,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b>806.600.970,00</b>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	699.679.200,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.960,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	33.972.960,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	223.250.880,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	223.250.880,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	31.466.400,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	31.466.400,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	105.888.960,00	ADD, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	105.888.960,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	22.100.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	22.100.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.850.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.850.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	34.800.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.800.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	28.350.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.350.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	216.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	216.000.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>20.217.370,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	14.211.970,00	ADD, DLL, PAD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	14.211.970,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	6.005.400,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.005.400,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>13.145.000,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	5.345.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.345.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4.900.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.900.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>27.369.400,00</b>	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R eguler)	1.750.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	10.305.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.305.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	6.021.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.021.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.425.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.425.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.068.400,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.068.400,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	4.800.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>46.190.000,00</b>	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	2.250.000,00	PAD
1.5.01	5.3.	Belanja Modal	2.250.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	27.020.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.020.000,00	
1.5.90		Penetapan dan Penegasan Batas Desa	13.000.000,00	DDS
1.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	3.920.000,00	PAD
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.920.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>455.811.490,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>41.800.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	41.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.800.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>217.128.550,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Pollndes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	37.100.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.100.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	168.508.550,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.0.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	188.508.550,00	
2.0.03		Penyediaan dan Pemeliharaan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kesehatan dll)	8.720.000,00	DDS
2.0.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.720.000,00	
2.0.04		Penyelenggaraan Desa Sloga Kesehatan	271.800.000,00	DDS, PBK
2.0.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
2.0.04	5.3.	Belanja Modal	270.000.000,00	
2.0.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Perikanan/Pulvika/PKD **	3.000.000,00	DDS
2.0.06	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>184.882.940,00</b>	
2.3.06		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Salokan/Parit/Drainase dll)	3.000.000,00	DLL
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Masyarakat	26.106.310,00	DLL
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.106.310,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemukiman /Situs Bersejarah/Pelisan Milik Desa	5.000.000,00	DLL
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	150.776.630,00	DDS, DLL, PBH
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	150.776.630,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>6.000.000,00</b>	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	6.000.000,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.5.		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>6.000.000,00</b>	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	6.000.000,00	DDS
2.5.02	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
3		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>78.890.950,00</u></b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>10.775.000,00</b>	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	4.550.000,00	DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.550.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	6.225.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.225.000,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>4.200.000,00</b>	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	4.200.000,00	DDS
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>36.865.950,00</b>	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	27.325.950,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	27.325.950,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	9.540.000,00	ADD, DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.540.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>27.050.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPML/PMMD	8.550.000,00	ADD, DDS, PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.550.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	18.500.000,00	ADD, DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.500.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>335.750.000,00</u></b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>21.250.000,00</b>	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggl lingan)/KETAHANAN PANGAN	5.000.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)/ K ETAHANAN PANGAN	5.000.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana/ KETAHANAN PANGAN	11.250.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.250.000,00	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>9.000.000,00</b>	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4.500.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.500.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
4.5.		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>3.000.000,00</b>	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	3.000.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.6.		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>2.500.000,00</b>	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	2.500.000,00	DDS
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4.7.		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>300.000.000,00</b>	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Millik Desa	300.000.000,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	300.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>103.200.000,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>3.000.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	3.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.000.000,00	
5.2.		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>3.000.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	3.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.000.000,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>97.200.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	97.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	97.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.050.253.410,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(73.763.930,00)</b>	
	<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	78.763.930,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>73.763.930,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Balongrejo, 23 Desember 2022

